

FEEDBACK KEBIJAKAN PELARANGAN HAMIL OLEH PEMERINTAH BRAZIL DALAM PENANGGULANGAN VIRUS ZIKA

Christina Napitupulu¹
Nim. 1102045071

Abstract

Zika virus in South America began to be detected from 2014 and began to spread in Brazil in December. The rising number of pregnant women infected with the Zika virus and infants exposed to microcephaly by 2016 has prompted the Brazilian Government to adopt a policy of forbidding women in Brazil to become pregnant until the virus can be controlled. The purpose of this research is to determine the feedback of the delay pregnancy policy leads to different reactions from Brazilian society on Zika Virus. The government appeal of delay pregnancy got different reactions from the Brazilian. Some of them are pros and some of them are cons, and make the pregnant women in Brazil prefer to abort their babies which is forbidden in Brazil.

Keywords: *Feedback, Pros and Cons, Zika Virus, Brazil*

Pendahuluan

Virus Zika awalnya muncul pada tahun 1947 dan ditemukan pada seekor monyet rhesus di hutan Zika. Virus Zika di Brazil mulai menyebar ke bagian Amerika Latin dari Asia. Virus ini menyebar saat ada perlombaan mengayuh kano tahun 2014 lalu di area Pasifik Selatan. Virus ini mengakibatkan penderitanya mengalami demam, ruam, nyeri sendi, serta konjungtivitis, menyerang dan menjangkiti para wanita hamil. Pada ibu hamil yang terkena gigitan nyamuk, virus ini menyerang janin dan mengakibatkan penyusutan otak (mikrosefalus), kondisi dimana sebagian otak atau tengkorak janin hilang bahkan mengakibatkan kematian. Pemeriksaan laboratorium sederhana biasanya hanya menunjukkan penurunan kadar sel darah putih seperti umumnya infeksi virus lainnya. Berbeda dengan infeksi demam berdarah, infeksi virus Zika tidak menyebabkan penurunan kadar trombosit.

Beberapa negara pun merasakan dampak dari penyebaran virus ini, mulai dari Brazil, El Salvador, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. El Salvador, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. El Salvador merupakan negara dengan jumlah kelahiran bayi cacat terbesar. Sehubungan dengan tingginya angka penyebaran virus ini maka pada 1 Februari 2016 WHO menetapkan Zika sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (*Public Health Emergency of International*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: christinpri@gmail.com

Concern/PHEIC), yang artinya masalah Zika menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang memerlukan kerjasama internasional. Pemerintah Brazil telah berupaya mengatasi permasalahan virus Zika, diantaranya dengan melakukan sosialisidan penyuluhan guna peningkatan akan kesadaran kesehatan masyarakat terhadap penyebaran virus Zika, melakukan pengasapan untuk menekan pertumbuhan nyamuk disekitar pemukiman masyarakat. Selain itu menteri kesehatan Brazil juga menyarankan masyarakatnya untuk melakukan penundaan kehamilan hingga wabah Zika bisa terkendali. Hal ini menjadi permasalahan dan menimbulkan perdebatan pro dan kontra mengenai kebijakan pelarangan hamil dan pelegalan aborsi kandungan pada janin yang terinfeksi Zika di [Brazil](#). Sekitar 65% warga Brazil menolak perubahan UU yang selama ini hanya membolehkan aborsi jika kehidupan ibu berada dalam bahaya atau dalam kasus *anencephaly*- yaitu ketika janin akan lahir tanpa bagian otak dan tengkorak - sehingga hampir dipastikan tak akan berumur panjang setelah dilahirkan. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana pro dan kontra atas kebijakan pelarangan hamil oleh Pemerintah Brazil.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bersamaan dengan kelahirannya. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Pembahasan hak asasi manusia sebagai norma kehidupan dunia internasional, dan kemudian diikuti dengan pembahasan terhadap gagasan yang menantang universalisasi hak asasi manusia yang disuarakan oleh negara-negara berkembang dengan mengusung gagasan relativisme budaya. Sekarang kita kembali pada pembahasan mengenai diterimanya gagasan hak asasi manusia sebagai norma yang berlaku bagi setiap negara di dunia internasional. Secara garis besar, HAM dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya, hak-hak asasi ekonomi atau *property rights*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan memanfaatkannya, hak-hak asasi politik atau *politic rights*, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights*, seperti hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*, seperti peraturan mengenai penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan pengadilan.

Dari penjelasan teori diatas bisa dilihat hubungan antara kebijakan pelarangan hamil dan konsep hak asasi manusia sehubungan dengan peningkatan jumlah ibu hamil yang terjangkit virus zika dan melahirkan bayi cacat. HAM melihat kebijakan pemerintah mengenai pelarangan hamil merupakan suatu wujud pelanggaran kodrat manusia mengenaiahak untuk membentuk suatu keluarga.

Teori Sistem

Menurut David Easton, sistem merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari totalitas perilaku sosial, melalui mana nilai-nilai disebarkan untuk suatu masyarakat. Sistem politik terdiri dari alokasi nilai-nilai dimana pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan dan mengikat masyarakat secara keseluruhan. Teori ini mengandung *input* dan *output*. Input adalah *pemberi makan* sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: *tuntutan* dan *dukungan*. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan *intrasocietal* maupun *extrasocietal*. Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya keamanan umum, hubungan industrial), ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik (misalnya mendirikan partai politik, kebebasan berorganisasi). Dari penjelasan teori diatas, dengan banyaknya jumlah wanita hamil yang terjangkiti virus zika maka pemerintah brazil mengeluarkan kebijakan perarangan hamil. Dari kebijakan pro dan kontra pelarangan hamil tersebut maka terlahirlah *feedback* yang berupa pro dan kontra dimana dari segi medis mendukung pemerintah brazil, menganggap hal tersebut merupakan hal yang wajar untuk dilakukan, sedangkan dari segi feminis/agama menentang kebijakan tersebut mengingat melanggar norma agama karena pada setiap agama pasti diajarkan untuk tidak membunuh dan kebijakan pelarangan hamil tersebut dianggap melanggar norma tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif *Case Study* untuk menggambarkan bagaimana pro dan kontra terhadap Pemerintah Brazil mengenai kebijakan pelarangan hamil. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, data ini untuk mendukung penulis pada penelitian melalui buku-buku pustaka, file yang didownload di internet dan berupa dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu berupa analisa isi kebijakan pelarangan hamil serta pro dan kontra yang muncul akibat kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, buku-buku referensi dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan serata mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang di download dari internet sebagai bahan referensi penelitian.

Hasil Penelitian

Brazil merupakan negara terbesar di kawasan Amerika Selatan. Kebudayaan negara tersebut adalah hasil perbauran antara suku Indian asli, pendatang dari Eropa dan Afrika. Kehidupan sosial dan budaya di Brazil terkenal dengan keragamannya. Hal tersebut disebabkan karena begitu banyak pengaruh yang telah berkontribusi, salah

satu yang terbesar adalah pengaruh dari Portugis karena Brazil pernah menjadi bagian dari kolonialisasi Portugis. Brazil merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar di Amerika Latin. Brazil memiliki banyak budaya dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat setempat, salah satu budaya atau kebiasaan yang terdapat di negara tersebut adalah seks bebas. Brazil termasuk dalam negara yang melakukan prostitusi. Mayoritas penduduk Brazil menganut agama Katolik. Mengenai Zika, pandangan Agama mengenai aborsi menganggap aborsi merupakan hal yang tabu untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan isi Kitab dan dianggap membunuh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut aborsi masih dianggap momok dan menjadi perbincangan panjang serta perdebatan diantara masyarakat di Brazil.

Gambaran Umum Penyebaran Virus Zika

WHO menetapkan bahwa virus ini sebagai darurat kesehatan publik yang membutuhkan perhatian lebih karena kekhawatiran akan virus zika menyebar jauh dan cepat dan menimbulkan konsekuensi yang lebih parah. Penyebaran virus Zika dibelahan Benua Amerika, khususnya Amerika Latin menarik perhatian dunia hingga menimbulkan persoalan pelik di tengah-tengah masyarakat dunia. Di Brazil, penyebaran virus Zika berada pada tingkat tertinggi dari semua negara Amerika Latindan telah menyebar di lebih dari 20 negara di kawasan itu. Beberapa negara menganjurkan kaum perempuan untuk menunda kehamilan sampai informasi rinci mengenai virus Zika terungkap. Para ahli meyakini virus Zika terkait dengan komplikasi dalam kehamilan, termasuk keguguran, bayi meninggal dunia dalam kandungan, kelahiran prematur, dan masalah mata pada janin. Kebijakan penundaan kehamilan ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Peningkatan kasus mikrosefali bagi bayi yang baru lahir di Brazil, tidak bisa terlepas dari penyebaran nyamuk *Aedes Aegypti* yang menjadi perdebatan kontroversial soal legal atau tidaknya melakukan aborsi jika bayi dalam kandungannya kedapatan terkena mikrosefali. Di Brazil sendiri, hukum yang mengatur aborsi dianggap cukup keras, kecuali wanita itu merupakan korban perkosaan atau hidupnya terancam jika melahirkan akan berakibat pada kematiannya.

Seperti diketahui, jumlah bayi terdampak *mikrosefali* mengalami peningkatan sangat tajam dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan sebagai keadaan darurat global atas virus yang disebarkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti*. Atas dasar inilah, kaum aktivis feminis pro-aborsi di Brazil menyerukan agar hukum yang mengatur larangan aborsi dihilangkan khusus bagi wanita hamil yang terinfeksi. Mereka menganggap bahwa setiap perempuan yang terinfeksi mempunyai hak untuk memilih.

Namun sebaliknya, pernyataan tersebut mendapat pertentangan keras dari kelompok-kelompok pro-kehidupan, *American Life League* dan *Stop Planned Parenthood International* (STOPP), para pemuka agama dan undang-undang yang mengatur tentang larangan pelegalan aborsi yang mengatakan bahwa aborsi bukanlah tawaran solusi untuk krisis saat ini di Amerika Tengah dan Selatan bayi bayi yang lahir. Mereka menganggap bahwa hal tersebut sama saja dengan membunuh bayi dengan virus. Mereka juga disini melihat ada belas kasihan, tidak ada protes untuk menemukan obat atau vaksinnnya, jawaban yang ditawarkan adalah untuk mengakhiri

kehidupan orang-orang yang memiliki (atau mungkin memiliki) mikrosefali. Mereka menganggap bahwa bayi dalam kandungan adalah manusia ciptaan Tuhan dan itu harus dirawat. Hal ini menjadi sebuah perselisihan antara pendukung aborsi dengan menekan undang-undang dengan pendukung hak asasi manusia yang mana virus zika merupakan ancaman mengerikan untuk wanita, anak-anak dan lain-lain, tetapi ketika aborsi anak dianggap sebagai penangkal, jelas ada sesuatu yang salah dengan sikap mereka dibanding dengan lebih memilih pengembangan vaksin untuk melawan virus daripada menghilangkan nyawa.

Perdebatan ini masih terjadi khususnya di parlemen Brazil terkait kerasnya undang-undang anti aborsi disana. Selain itu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika mengeluarkan larangan kunjungan (*travel warning*) ke 22 negara karena wabah virus zika yang terus meluas. Sehubungan dengan adanya himbuan larangan melakukan perjalanan ke 22 negara tersebut diharapkan bagi para wanita hamil untuk mempertimbangkan menunda perjalanan ke tujuan tersebut karena virus yang semakin menyebar luas. Selain itu CDC juga menyarankan semua wisatawan untuk melakukan tindakan pencegahan, termasuk menggunakan obat nyamuk dan mengenakan baju lengan panjang untuk menghindari gigitan nyamuk guna menghindari potensi penyebaran virus Zika lebih luas lagi.

Kebijakan Pelarangan Hamil di Brazil

Menurut WHO, saat ini virus Zika telah menyebar cepat di 21 negara di Amerika Selatan Sejumlah Negara Amerika Latin pun telah mengambil langkah preventif untuk mencegah wabah virus Zika, termasuk Brazil. Sehubungan belum adanya vaksin dan obat-obatan yang ditemukan untuk mengobati masyarakat yang terkena virus zika dan para bayi yang terkena mikrosefali, Pemerintah Brazil melakukan aksi untuk mengurangi angka bayi yang terkena virus mikrosefali melalui Menteri Kesehatan Brazil dengan mengutus pasukan pembasmi nyamuk untuk menyisir setiap rumah penduduk melakukan pengasapan untuk menganggulangi dan meredam angka bayi yang terkena virus zika. Pemerintah juga menghimbau masyarakat setempat untuk tidak melakukan perjalanan jauh guna menghindari potensi berkembangnya virus zika lebih besar lagi. Dengan langkah ini Pemerintah Brazil bisa meredam angka korban virus zika serta bayi-bayi yang terkena mikrosefali lebih besar lagi. Disamping itu para ilmuwan tengah berupaya untuk terus melakukan percobaan guna menemukan obat-obatan dan vaksin untuk mengobati para korban virus Zika. Para ilmuwan mengharapkan bahwa vaksin tersebut bisa siap diedarkan secara luas ke masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

Kebijakan pelarangan hamil sepanjang masih maraknya serangan virus Zika adalah ataskedaruratan dan tidak bersifat permanen sebagaimana disampaikan oleh Menteri kesehatan Brazil Marcelo Castro yang tertuang dalam situs resmi kementerian kesehatan Brazil :

“A declaração de Espin pelo ministro da Saúde não foi um ato meramente formal ou instrumento para flexibilização de medidas administrativas. A então presidenta da República, Dilma Roussef, deixou em segundo plano a crise política que o governo vivia, envolveu-se pessoalmente e tomou para si o comando da resposta à emergência. Convocou a equipe do Ministério da Saúde para atender o governador de

Pernambuco com seu secretário de Saúde e apropriou-se das informações e da gravidade do problema”.

Deklarasi Espin oleh Menteri Kesehatan itu murni merupakan tindakan formal atau instrumen tindakan administratif. Seiring permintaan Presiden Dilma Rousseff yang berhadapan dengan situasi krisis politik, akan tetapi bahwa pemerintah harus secara langsung terlibat dan mengambil keputusan yang bersikap darurat. Ia menyerukan agar apa yang disampaikan kepada kementerian kesehatan Brazil selanjutnya dilaksanakan Gubernur negara bagian selanjutnya disesuaikan dengan informasi tingkat keparahan masalah.

Kebijakan pemerintah Brazil melalui Kementerian kesehatan tersebut tertuang secara resmi dalam bentuk surat keputusan atau surat edaran lazimnya dalam sistem administrasi pemerintahan yakni (Ministério da Saúde Gabinete do Ministro : PORTARIA Nº 1.813, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015. Judul surat “*Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) por alteração do padrão de ocorrência de microcefalias no Brasil*. Peraturan Kementerian Departemen Kesehatan Nomor 1.813.11. November 2015 tentang pernyataan penting kondisi darurat nasional kesehatan masyarakat (ESPIN) terhadap pola perubahan mikrocefali di Brazil yang merupakan dampak lanjutan dari penyebaran virus Zika sehingga kebijakan tersebut dikeluarkan dimana menjelaskan kondisi darurat kesehatan sekaligus menyertakan himbauan pelarangan hamil dalam kurun waktu tertentu dalam satu kesatuan kebijakan.

Deklarasi darurat kesehatan virus Zika melalui menteri kesehatan Brazil berisi mengenai penetapan strategi tindak lanjut dan dukungan kepada ibu hamil, anak-anak, dan wanita-wanita yang berniat untuk menjalankan program kehamilan. Berdasarkan lampiran II Peraturan Kesehatan Internasional, yang mengindikasikan potensi kondisi darurat nasional kesehatan masyarakat.

Menimbang bahwa situasi atas tindakan pencegahan, pengendalian dan penahanan risiko, kerusakan dan kerusakan pada kesehatan masyarakat, hal tersebut dapat diselesaikan:

Pasal 1 : Menyatakan akan pentingnya darurat kesehatan masyarakat nasional sesuai dengan Keputusan 7.616, tanggal 17 November 2011

Pasal 2 : Menetapkan Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat (COES) sebagai mekanisme pengelolaan nasional atas tanggapan darurat yang terkoordinasi di tingkat nasional

Pasal 3 : Pengelolaan COES akan berada dibawah tanggung jawab Sekretariat Surveillance Kesehatan yang ditujukan untuk:

Merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan tindakan yang akan dipekerjakan selama ESPIN, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan :

I - Merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan tindakan yang akan dipekerjakan selama ESPIN, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,

II - Mengartikulasikan dengan manajer negara bagian, kabupaten dan kota,

III – Mengirim laporan permintaan, laporan teknis ESPIN dan tindakan administratif yang sedang diproses ke Menteri Negara Kesehatan secara teratur,

IV - Mengungkapkan informasi kependudukan yang terkait dengan ESPIN,
V - Mengusulkan, yang dapat dibenarkan, kepada Menteri Kesehatan, mempekerjakan sementara para profesional, sesuai dengan ketentuan butir II.
Himbauan Pemerintah untuk menunda kehamilan pun menghasilkan pro dan kontra.

Sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah korban sejak tahun 2014 sampai dengan 2015-2016 maka Pemerintah Brazil pun mulai memberlakukan larangan hamil bagi para wanita di Brazil. Disamping itu tidak sedikit dari para ibu hamil yang telah positif terinfeksi lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya dengan melakukan aborsi karena takut anaknya terlahir cacat. Yang menjadi permasalahan ialah mengenai pelegalan dalam melakukan aborsi. Brazil sendiri merupakan salah satu negara yang menentang dilakukannya aborsi selain dari alasan keselamatan sang ibu atau bayi. Namun lebih dari setengah penduduk Brazil menentang akan kebijakan tersebut, salah satunya adalah para pemuka agama yang menganggap bahwa aborsi itu merupakan suatu hal yang tidak patut untuk dilegalkan karena bersifat membunuh. Akan tetapi ada juga beberapa lembaga dan organisasi ada juga yang mendukung salah satunya adalah para kaum feminis, mereka menganggap bahwa aborsi boleh menjadi pilihan para wanita yang tidak ingin melahirkan bayi cacat. Kondisi tersebut memaksa pemerintah Brazil mengambil sikap, melalui menteri kesehatan Brazil yang menyatakan Status Darurat dan Pelarangan Kehamilan yang kemudian menuai pro kontra ditengah-tengah masyarakat dan dunia internasional.

Kaum Feminis merupakan salah satu yang pro atas diberlakukannya kebijakan pelarangan hamil. Para kaum Feminis meganggapi positif terhadap kebijakan ini yang menganggap bahwa kebijakan tersebut mendukung kesejahteraan gender antar pria dan wanita. Selain itu mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut melindungi hak-hak asasi mereka sebagai wanita. Mereka menganggap bahwa para wanita patut diapresiasi dan dilindungi. Tingginya tanggapan positif mengenai pilihan untuk menghindari kehamilan tersebut menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat di Brazil untuk mencegah penyebaran virus Zika terbilang tinggi, terlebih demi masa depan akan anak-anak yang akan mereka lahirkan berpotensi tertular virus Zika dan semakin diperkuat dengan adanya sebuah kelompok pengacara di Brasil, aktivis dan ahli sains meminta agar Mahkamah Agung untuk mengizinkan aborsi bagi perempuan yang terkena virus Zika Jika dikaitkan dengan konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Konsep Hak Asasi Manusia yang mengusung segala bentuk hak melekat dalam diri pribadi dilindungi sejak lahir secara kasat mata seakan bertentangan. Namun melihat adanya keinginan dan rasa takut dari para perempuan di Brazil atas resiko kecacatan bayi yang mereka lahirkan, ditambah adanya dukungan para aktifis pengacara dan aktifis seni-saint agar dilegalkannya aborsi bagi perempuan yang secara medis divonis terjangkit virus Zika juga pada dasarnya mengandung misi kemanusiaan.

Misi kemanusiaan yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini yakni, adanya hasil penelitian para ahli terkait kondisi bayi terserang virus Zika berakibat fatal berupa *Microsifalus* yang berdampak pada kecacatan mental pada si anak. Artinya dengan membiarkan terjadinya kehamilan pada saat darurat sebagaimana diumumkan oleh menteri kesehatan Brazil, bila berujung pada terjangkitnya bayi dan lahir dengan cacat mental justru telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya manusia

tidak dapat menentukan seperti apa seorang anak akan dilahirkan. Namun dengan kondisi penyebaran virus Zika, lahirnya generasi yang mengidap penyakit cacat fisik dan cacat mental bagi seorang ibu hamil yang terserang sudah dapat dipastikan. Dengan demikian, sudah dapat pula diketahui beban hidup si anak dimasa yang akan datang. Pilihan untuk mencegah hal tersebut terjadi, yakni membenarkan kebijakan pemerintah Brazil tersebut yaitu berupa larangan hamil hingga tahun 2018 sejak kebijakan itu disampaikan. Larangan hamil bukan berarti serta merta di ikuti dengan larangan untuk membina keluarga, sebagaimana merupakan hak dasar bagi setiap individu. Disisi lain, sifat dari kebijakan pelarangan hamil tersebut yaitu hanya untuk sementara, memberikan peluang bagi setiap insan yang menginginkan keturunan tetap dapat terwujud, dengan catatan hingga 2018 tersebut berlalu.

Sejalan dengan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yang mana teori sistem menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan analisis penulisan, dalam definisinya “sistem merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari totalitas perilaku sosial, melalui mana nilai-nilai disebarikan untuk suatu masyarakat. Dalam pengambilan sebuah kebijakan tentunya pemerintah memperhitungkan setiap dampak yang akan dilahirkan, sekaligus timbulnya pro dan kontra akan kebijakan yang di ambil berupa *feedback* atau umpanbalik/tanggapan. Untuk kebijakan pelarangan hamil oleh pemerintah brazil, tanggapan dalam bentuk pro (berpihak) terhadap kebijakan tersebut. Keberpihakan (pro) terhadap kebijakan larangan hamil merupakan hasil dari kinerja sebuah sistem yang saling berkaitan.

Pada konteks ini indikasi kedaruratan medis merupakan bagian penguat yang selaras pula dengan kontek konsep Hak Asasi Manusia. Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; danatau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana telah terpenuhi dalam berbagai hasil penelitian para ahli di negara Brazil.

Larangan hamil yang dikemas dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah Brazil menuai pertentangan dari sejumlah kalangan. Seperti kalangan pemuka-pemuka agama dan pecinta HAM baik itu di negeri tersebut maupun dunia internasional. Sudut pandang yang dibangun yakni bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terkait hak setiap individu untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan, seperti yang sudah tertuang dalam butir-butir garis besar Hak Asasi Manusia yang diakui dan diratifikasi oleh setiap negara dalam bentuk konstitusi/undang-undang di negaranya, tidak terlepas di negara Brazil. Ditambah lagi dengan jaminan bagi setiap perempuan seperti yang sudah disepakati dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Konvensi ini menjadi instrumen bagi setiap perempuan di seluru dunia untuk dihormati hak-haknya, termasuk didalamnya hak untuk mengandung/hamil. Selain itu, adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan lahirnya kebijakan pemerintah Brazil tersebut yakni terhadap Hak

Anak yang lahir dengan cacat yang terjangkit virus Zika dengan indikasi/vonis medis menderita *microsefalus* seakan menjadi momok bagi masyarakat di Brazil sepanjang penyebaran virus tersebut, sehingga dijadikan dasar untuk pelarangan hamil bagi setiap perempuan bersuami. Hak anak sebagaimana pertama sekali digagas pada tahun 1923, kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 yang dikenal dengan (*Convention Of the Rights Of the Child*) memberikan jaminan hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi.

Maka dari sudut pandang konsep hak asasi manusia, baik dari konteks hak perempuan maupun dari segi hak anak, penulis melihat adanya ketidak tepatan dengan lahirnya kebijakan tersebut. Dapat dikatakan, kebijakan pelarangan hamil telah mencederai nilai-nilai hak asasi manusia yang dihormati oleh dunia internasional, terkhusus bagi kesempatan untuk membangun keluarga, melanjutkan keturunan bagi setiap perempuan dan tidak adanya kesempatan bagi anak-anak yang notabene ciptaan Tuhan meskipun terlahir tidak sempurna, dengan kata lain terlahir cacat fisik maupun mentalnya untuk melanjutkan kehidupan seiring kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Brazil. Sebagai negara yang tengah ditimpa musibah virus Zika, banyak harapan yang diinginkan warga Brazil dalam mencegah virus Zika menyerang, salah satunya dalam penggunaan alat kontrasepsi. Sebagai pemeluk agama Katolik sekitar 65%, Brazil selama ini mengikuti larangan yang disampaikan oleh pihak Vatikan dalam penggunaan alat kontrasepsi. Sampai saat ini para pemuka-pemuka agama berusaha untuk melonggarkan peraturan dalam penggunaan alat kontrasepsi. Selain itu pelarangan hamil juga mendapat pertentangan keras dari para pemuka-pemuka agama yang menganggap bahwa kebijakan tersebut melanggar isi dari kitab-kitab dan menganggap bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan jika para calon ibu memilih untuk menggugurkan kandungan mereka.

Feedback Kebijakan Pelarangan Hamil

Virus Zika dapat menyerang siapapun, terutama pada ibu hamil yang bisa berdampak pada perkembangan janin dalam kandungan ibu hamil telah terserang virus Zika yang kemudian berlanjut pada timbulnya penyakit mikrosefali pada bayi yang dilahirkan. Dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan baik dan kemungkinan terburuk akan mengalami cacat mental permanen baik secara fisik maupun mental.

Melihat hal tersebut, lahirnya kebijakan pemerintah Brazil terhadap pelarangan hamil dalam jangka waktu tertentu bagi sebagian pihak menuai dukungan dengan berbagai dasar. Tidak luput pula hal tersebut ditanggapi langsung oleh sejumlah perempuan yang mana sesuai hasil penelitian yang dilakukan dimana hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden mengatakan bahwa mereka telah tau berusaha menghindari kehamilan karena epidemi penyakit Zika. Sementara itu, hanya 27 persen mengemukakan bila mereka tidak mencoba menghindari kehamilan

karena Zika. Selanjutnya, ada 16 persen dari responden mengatakan bahwa mereka tidak merencanakan kehamilan, terlepas dari risiko wabah virus Zika.²

1. Kaum Feminis

Kaum Feminis merupakan kaum pembela emansipasi wanita, pembela kaum Feminis berperan mewakili suara wanita dan mempunyai peran dalam memperjuangkan hak para wanita. Sehubungan dengan adanya kebijakan pelarangan hamil *Center for Feminist Studies and Advisory Services (CFEMEA)*, *Women's Global Network for Reproductive Rights (WGNRR)* dan *the Latin American and Caribbean Women's Health Network (LACWHN)*. Mereka merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) yang pro atas diberlakukannya kebijakan pelarangan hamil dan pelarangan aborsi. Mereka menanggapi positif terhadap kebijakan ini yang menganggap bahwa kebijakan tersebut mendukung kesejahteraan gender antar pria dan wanita. Kaum Feminis melakukan kampanye untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut melindungi hak-hak asasi mereka sebagai wanita. Mereka menganggap bahwa para wanita patut diapresiasi dan dilindungi. Kaum ini juga pro atas pelegalan aborsi pada para wanita hamil yang positif terjangkit virus Zika. Mereka melakukan kampanye menggunakan jejaring sosial dan menyebarkan lebih dari 50.000 brosur dan 15.000 poster yang memuat pesan tentang ajakan yang ditujukan kepada para wanita yang belum hamil atau sedang mengandung untuk menginformasikan kehamilan mereka dan kapan saat yang tepat untuk hamil yang mana brosur dan poster tersebut didistribusikan ke tempat-tempat unit kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, sekolah, serta organisasi-organisasi wanita. Selain melalui brosur dan poster, kampanye juga dilakukan melalui siaran radio. Siaran radio ini membahas mengenai layanan kesehatan yang tersedia untuk memberikan informasi dan saran mengenai hak perempuan, dimana wanita harus memiliki hak untuk memilih apa yang harus dilakukan dengan tubuh mereka, dan keputusan itu terlepas dari stigma, prasangka atau tekanan sosial.

Dukungan para wanita untuk menghindari kehamilan tersebut menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat di Brazil untuk mencegah penyebaran virus Zika terbilang tinggi, terlebih demi masa depan anak-anak yang akan mereka lahirkan berpotensi tertular virus Zika dan semakin diperkuat dengan adanya sebuah kelompok pengacara di Brazil, aktivis dan ahli sains meminta agar Mahkamah Agung untuk mengizinkan aborsi bagi perempuan yang terkena virus Zika.

2. Medis

Selain kaum Feminis yang telah disebutkan di atas, kaum medis juga ikut mengambil peran dalam memberikan tanggapan. Para dokter dan lembaga-lembaga kesehatan di Brazil mendukung kebijakan pelarangan tersebut dengan alasan kesehatan dengan cara memberikan penyuluhan kepada para wanita melalui rumah sakit dan puskesmas tentang pentingnya pemilihan waktu yang

tepat untuk hamil guna menghindari bayi mereka lahir cacat akibat paparan virus Zika.

Jika dikaitkan dengan konsep HAM yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang mengusung segala bentuk hak melekat dalam diri pribadi dilindungi sejak lahirseakan bertentangan. Namun melihat adanya keinginan dan rasa takut dari para perempuan di Brazil atas resiko kecacatan bayi yang mereka lahirkan, ditambah adanya dukungan para aktifis pengacara dan aktifis seni-saint agar dilegalkannya aborsi bagi perempuan yang secara medis divonis terjangkit virus Zika juga pada dasarnya mengandung misi kemanusiaan.

Misi kemanusiaan yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini yakni, adanya hasil penelitian para ahli terkait kondisi bayi terserang virus Zika berakibat fatal berupa mikrosefali yang berdampak pada kecacatan mental pada si anak. Artinya dengan membiarkan terjadinya kehamilan pada saat darurat sebagaimana diumumkan oleh menteri kesehatan Brazil, bila berujung pada terjangkitnya bayi dan lahir dengan

Pada dasarnya manusia tidak dapat menentukan seperti apa seorang anak akan dilahirkan. Namun dengan kondisi penyebaran virus Zika, lahirnya generasi yang mengidap penyakit cacat fisik dan cacat mental bagi seorang ibu hamil yang terserang sudah dapat dipastikan. Dengan demikian, sudah dapat pula diketahui beban hidup si anak dimasa yang akan datang. Pilihan untuk mencegah hal tersebut terjadi, yakni membenarkan kebijakan pemerintah Brazil tersebut yaitu berupa larangan hamil hingga tahun 2018 sejak kebijakan itu disampaikan. Larangan hamil bukan berarti serta merta di ikuti dengan larangan untuk membina keluarga, sebagaimana merupakan hak dasar bagi setiap individu. Disisi lain, sifat dari kebijakan pelarangan hamil tersebut yaitu hanya untuk sementara, memberikan peluang bagi setiap insan yang menginginkan keturunan tetap dapat terwujud, dengan catatan hingga 2018 tersebut berlalu.

Sejalan dengan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yang mana teori sistem menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan analisis penulisan, dalam definisinya “sistem merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari totalitas perilaku sosial, melalui mana nilai-nilai disebarakan untuk suatu masyarakat. Dalam pengambilan sebuah kebijakan tentunya pemerintah memperhitungkan setiap dampak yang akan dilahirkan, sekaligus timbulnya pro dan kontra akan kebijakan yang di ambil berupa *feedback* atau umpan balik/tanggapan. Untuk kebijakan pelarangan hamil oleh pemerintah Brazil, tanggapan dalam bentuk pro (berpihak) terhadap kebijakan tersebut.

Pada konteks ini indikasi kedaruratan medis merupakan bagian penguat yang selaras pula dengan konteks konsep Hak Asasi Manusia. Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, danatau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan

sebagaimana telah terpenuhi dalam berbagai hasil penelitian para ahli di negara Brazil.

Suatu kebijakan akan menghasilkan pro dan kontra ditengah masyarakat, dan sudut pandang kontra (menentang) juga terdapat dalam kebijakan pelarangan hamil ini. Sudut pandang yang dibangun bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terkait hak setiap individu untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan, seperti yang sudah tertuang dalam butir-butir garis besar Hak Asasi Manusia yang diakui dan diratifikasi oleh setiap negara dalam bentuk konstitusi/undang-undang di negaranya, tidak terlepas di negara Brazil. Ditambah lagi dengan jaminan bagi setiap perempuan seperti yang sudah disepakati dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Konvensi ini menjadi instrumen bagi setiap perempuan diseluruh dunia untuk dihormati hak-haknya, termasuk didalamnya hak untuk mengandung/hamil. Selain itu, adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan lahirnya kebijakan pemerintah Brazil tersebut yakni terhadap Hak Anak yang lahir dengan cacat yang terjangkit virus Zika dengan indikasi/vonis medis menderita mikrosefaliseakan menjadi momok bagi masyarakat di Brazil sepanjang penyebaran virus tersebut, sehingga dijadikan dasar untuk pelarangan hamil bagi setiap perempuan bersuami.

Hak anak sebagaimana pertama sekali digagas pada tahun 1923, kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 1990 yang dikenal dengan (*Convention Of the Rights Of the Child*) memberikan jaminan hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi. Adapun kaum yang kontra antara lain :

1. *Center for Reproductive Rights*

Center for Reproductive Rights merupakan organisasi yang mendukung hak reproduksi setiap individu. CRR merespon negatif terhadap kebijakan pelarangan hamil yang diberlakukan pemerintah Brazil. CRR menganggap bahwa setiap wanita berhak untuk dihargai dalam memilih waktu yang tepat kapan para wanita ingin hamil serta jaminan semua akses para wanita terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi melalui penyuluhan yang ditujukan pada para perempuan di Brazil yang diadakan di rumah sakit dan lembaga kesehatan setempat, termasuk dukungan sosial dan ekonomi untuk para wanita yang tinggal di lingkungan masyarakat yang terkena dampak Zika yang kekurangan akses tempat kesehatan. CRR juga menganggap akan pentingnya akses terhadap kontrasepsi bagi para wanita yang ingin menunda atau menghindari kehamilan.

Hak asasi manusia, baik dari konteks hak perempuan maupun dari segi hak anak, penulis melihat adanya ketidaktepatan akan lahirnya kebijakan tersebut. Dapat dikatakan, kebijakan pelarangan hamil telah mencederai nilai-nilai hak asasi

manusia yang dihormati oleh dunia internasional, terkhusus bagi kesempatan untuk membangun keluarga, melanjutkan keturunan bagi setiap perempuan dan tidak adanya kesempatan bagi anak-anak yang notabene ciptaan Tuhan meskipun terlahir tidak sempurna, dengan kata lain terlahir cacat fisik maupun mentalnya untuk melanjutkan kehidupan.

2. Agama

Sebagai negara yang tengah ditimpa musibah virus Zika, banyak harapan yang diinginkan warga Brazil dalam mencegah virus Zika, salah satunya dalam penggunaan alat kontrasepsi. Sebagai pemeluk agama Katolik sekitar 65%, Brazil selama ini mengikuti larangan yang disampaikan oleh pihak Vatikan dalam penggunaan alat kontrasepsi. Sampai saat ini para pemuka-pemuka agama (Pendeta dan Pastor) berusaha untuk melonggarkan peraturan dalam penggunaan alat kontrasepsi. Para Pendeta dan Pastor di negara tersebut menganggap bahwa kebijakan tersebut melanggar isi dari Kitab-Kitab yang dikategorikan pembunuhan jika para calon ibu memilih untuk menggugurkan kandungan mereka. Melalui isi Kitab **NÃO MATAR (Ex 20,13) yang berisi perintah dilarang membunuh**, karena melakukan aborsi merupakan tindakan membunuh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Melalui ibadah yang diadakan setiap Gereja diharapkan para wanita mengurungkan niat mereka untuk melakukan aborsi terhadap calon bayi mereka.

Dampak Kebijakan Pelarangan Hamil Pemerintah Brazil

Dengan meluasnya penyebaran virus Zika, pemerintah memberlakukan larangan hamil bagi para wanita di Brazil. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa negara memberlakukan larangan hamil di negara mereka, salah satunya adalah Brazil. Sebuah lembaga resmi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) pun memberlakukan larangan hamil di berbagai negara. Diharapkan dengan adanya pelarangan tersebut bisa mengurangi jumlah korban virus Zika dan bayi yang lahir cacat akibat mikrosefali.³

Kebijakan pelarangan hamil akibat virus Zika juga menuai pro dan kontra. Sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah korban sejak tahun 2014 sampai dengan 2015-2016 maka Pemerintah Brazil pun mulai memberlakukan larangan hamil bagi para wanita di Brazil. Disamping itu tidak sedikit dari para ibu hamil yang telah positif terinfeksi lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya dengan melakukan aborsi karena takut anaknya terlahir cacat. Yang menjadi permasalahan ialah mengenai pelegalan dalam melakukan aborsi. Brazil sendiri merupakan salah satu negara yang menentang dilakukannya aborsi selain dari alasan keselamatan sang ibu atau bayi.

Namun lebih dari setengah penduduk Brazil menentang akan kebijakan tersebut, salah satunya adalah para pemuka agama yang menganggap bahwa aborsi itu merupakan suatu hal yang tidak patut untuk dilegalkan karena bersifat membunuh. Akan tetapi

ada juga beberapa lembaga dan organisasi ada juga yang mendukung salah satunya adalah para kaum feminis, mereka menganggap bahwa aborsi boleh menjadi pilihan para wanita yang tidak ingin melahirkan bayi cacat. Kondisi tersebut memaksa pemerintah Brazil mengambil sikap dalam bentuk kebijakan, melalui Menteri kesehatan Brazil yang menyatakan status darurat dan pelarangan kehamilan yang kemudian menuai pro kontra ditengah-tengah masyarakat dan dunia internasional dan menurut sebuah survei yang dilakukan terhadap para wanita di Brazil oleh sebuah lembaga kesehatan di Brazil pada tahun 2016 oleh Institut Datafolha, 58% responden pro terhadap kebijakan, dan 42% kontra terhadap kebijakan pelarangan hamil.⁴

Selain dampak tersebut, dampak yang cukup memprihatinkan juga pada sektor ekonomi negara Brazil. Dengan kasus penyebaran dan korban yang cukup besar, negara Brazil harus mengeluarkan anggaran kesehatan yang besar guna menanggulangi persoalan tersebut. Dana tersebut digunakan untuk membeli obat pembasmi nyamuk dan pestisida.

Sektor ekonomi juga cukup terganggu akibat dari serangan virus ini dimana Brazil mengalami penurunan pendapatan di sektor pariwisata karena banyak himbuan larangan berpergian dari berbagai negara agar tidak melakukan perjalanan ke negara latin terkhusus negara Brazil, sebagaimana diketahui Brazil merupakan destinasi wisata pantai terkenal di negara latin. Penurunan pendapatan negara ini semakin terasa pada saat Brazil menjadi tuan rumah pesta olahraga (olimpiade) yang digelar pada musim panas 2016 pada saat penyebaran virus Zika ini sedang tinggi. Dengan kondisi tersebut, merugikan bagi Brazil dari sisi ekonomi sebagai akibat dari penyebaran virus Zika.

Kesimpulan

Virus Zika merupakan virus berbahaya yang saat ini menjadi polemik bagi masyarakat Brazil. Virus ini awalnya muncul di Uganda, Afrika dan ditemukan pada seekor monyet di hutan negara tersebut lalu mulai muncul di daerah Asia kemudian masuk ke kawasan Amerika. Virus zika sendiri awalnya bukan merupakan penyakit berbahaya, penyakit ini akan berangsur-angsur menghilang dalam kurun waktu seminggu jika menjangkiti orang dewasa. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi berbahaya jika seekor nyamuk yang terjangkit virus zika menggigit ibu hamil yang mana akan menyebabkan sang cabang bayi berpotensi terkena mikrosefali. Mikrosefali sendiri merupakan kelainan yang diakibatkan oleh virus zika yang menyebabkan bayi terlahir cacat (ukuran kepala lebih kecil dari ukuran kepala bayi pada umumnya). Bayi yang terkena mikrosefali sendiri berpotensi lahir dengan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata dan bahkan pada sejumlah kasus dapat mengakibatkan kematian. Hal ini menjadi beban bagi para ibu-ibu hamil yang terkena virus ini, bahkan tidak sedikit dari mereka memilih untuk mengaborsi calon bayi mereka. Dalam hal ini terjadi polemik akan gagasan mengenai pelegalan aborsi pada bayi para ibu hamil yang terjangkit virus tersebut antara kelompok-kelompok pro kehidupan, para pemuka agama dan kaum feminis. Di Brazil sendiri Undang-Undang mengenai aborsi dianggap tabu dan sangat ditentang keras. Pemerintah Brazil

sendiritengah berupaya dalam menangani peningkatan jumlah korban zika dan mikrosefali. Pemerintah Brazil mengerahkan sekitar 200.000 tentara dalam upaya memerangi nyamuk pembawa virus Zika, yang diduga memicu penyebaran virus yang terkait dengan kondisi cacat lahir, pasukan militer tersebut melakukan perjalanan dari rumah ke rumah di seluruh Brazil, guna mendistribusikan pamflet dan memberikan nasihat soal pemberantasan nyamuk disamping itu juga pemerintah mendistribusikan obat nyamuk kepada para perempuan di Brazil.

Daftar Pustaka

Buku

Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21.

Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

Sulaiman Hamid, 2002. *HAM dalam Lembaga Suaka Hukum Intrnasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal.29.

Jurnal

Pengantar *Human Security*, tersedia dalam

<http://id.scribd.com/doc/51882487/Human-Security> (diakses pada 5 Oktober 2016)

Riel, Bob. *.Brazil - A Cultural Profile*. Halaman 1. Di akses dari <http://www.bobriel.com/pdf%20files/relo%20journal%20-%20Brazil.pdf>

Telles, Edward E. 2004. *Race In Another America*, Halaman 2. Diakses dari <http://press.princeton.edu/chapters/s7846.pdf>

Zika Virus Disease Epidemic: Potential Association With Microcephaly And Guillain-Barre Syndrome (first update), tersedia dalam <http://ecdc.europa.eu/en/publications/rapid-risk-assessment-zika-virus-first-update-jan-2016.pdf> (diakses pada tanggal 17 Januari 2017)

Media Online

Aktivis Brasil akan ajukan petisi legalkan aborsi bagi pengindap virus Zika, diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160129_dunia_virus_zika pada tanggal 20 Juli 2017

Brazil Asks Wheather Zika Acts Alone To Cause Birth Defects, tersedia dalam

<http://www.nature.com/news/brazil-asks-whether-zika-acts-alone-to-cause-birth-defects-1.20309>

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) por alteração do padrão de ocorrência de microcefalias no Brasil., diakses melalui http://bvsm.sau.de.gov.br/bvs/sau.delegis/gm/2015/prt1813_11_11_2015.html pada tanggal 11 November 2017

Khawatir zika, banyak wanita Brazil hindari kehamilan, diakses melalui <http://www.antaraneews.com/berita/603283/khawatir-zika-banyak-wanita-brazil-hindari-kehamilan> pada tanggal 10 Juli 2017

Virus zika cacat otak langka pada bayi di brazil meningkat, diakses melalui <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/virus-zika-cacat-otak-langka-pada-bayi-di-brazil-meningkat>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017

Virus Zika dan Aborsi: Kontroversi Terbaru “Terjadi pertentangan antara aborsi dengan HAM seorang anak untuk hidup”, diakses melalui <http://www.jitunews.com/read/30406/virus-zika-dan-aborsi-kontroversi-terbaru> pada tanggal 07 Februari 2017

Virus zika menyerang bayi, brazil larang perempuan hamil, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/05/060725111/virus-zika-menyerang-bayi-brasil-larang-perempuan-hamil>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017

Wanita hamil dilarang ke 22 negara ini karena virus Zika, diakses melalui <http://health.liputan6.com/read/2420244/wanita-hamil-dilarang-ke-22-negara-ini-karena-virus-zikapada> tanggal 10 Juli 2017